

V. KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN KETERBATASAN PENELITIAN

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh bentuk kelembagaan otoritas pajak, tingkat konsumsi rumah tangga, *foreign direct investment*, *industry value added*, *openness*, dan *dependency ratio* terhadap *tax ratio* pada negara-negara berkembang, mengetahui variabel yang paling mempengaruhi *tax ratio*, dan mengetahui perbandingan *tax ratio* pada negara-negara berkembang yang memiliki otoritas pajak model SARA dan non-SARA.

Sampel dalam penelitian ini adalah negara-negara berkembang yang mewakili negara-negara di kawasan Asia, Pasifik, Afrika, Amerika, serta Eropa. Tahun yang diamati adalah periode 10 (sepuluh) tahun dari tahun 2003 hingga tahun 2012. Metode *sampling* yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu penetapan sampel berdasarkan kriteria tertentu. Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari *World Governance Indicator* (Bank Dunia, 2015). Perangkat lunak yang digunakan untuk pengolahan data adalah *software Eviews* versi 7.

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk kelembagaan otoritas pajak yakni otoritas pajak model *semi autonomous revenue authority*/ SARA berpengaruh meningkatkan *tax ratio* pada negara berkembang. Hal ini berarti bahwa jika suatu negara berkembang menerapkan model SARA pada otoritas pajaknya maka *tax rasionya* akan meningkat.

2. Tingkat konsumsi rumah tangga pada negara-negara berkembang tidak berpengaruh terhadap *tax ratio* selain karena tingkat konsumsi rumah tangga pada negara-negara berkembang yang cenderung konstan dari tahun ke tahun juga disebabkan karena pada negara-negara berkembang, penerimaan didominasi oleh pajak tidak langsung yang bukan merupakan pajak progresif.
3. *Foreign direct investment* berpengaruh meningkatkan *tax ratio* pada negara-negara berkembang, yang berarti semakin banyak *foreign direct investment* yang masuk ke suatu negara berkembang, maka *tax ratio* negara tersebut juga akan semakin tinggi.
4. *Industry value added* berpengaruh menurunkan *tax ratio* pada negara-negara berkembang yang disebabkan karena terjadinya pergeseran struktur ekonomi yang disebut sebagai fase *post-industrialization*, dimana peran sektor industri dan pertanian dalam struktur perekonomian negara-negara berkembang terus menurun digantikan oleh sektor jasa.
5. *Openness* atau keterbukaan perdagangan internasional berpengaruh meningkatkan *tax ratio* pada negara-negara berkembang. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi volume perdagangan internasional suatu negara berkembang, maka *tax rasionya* juga semakin tinggi.
6. *Dependency ratio* berpengaruh menurunkan *tax ratio* pada negara-negara berkembang. Hal ini berarti semakin banyak jumlah penduduk usia non-produktif pada negara berkembang, maka *tax rasionya* akan semakin kecil.
7. *Dependency ratio* merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap *tax ratio* pada negara-negara berkembang.

8. Negara-negara berkembang yang memiliki otoritas pajak model SARA memiliki rata-rata *tax ratio* yang lebih tinggi dibandingkan negara berkembang dengan otoritas pajak model non-SARA.

5.2. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan penelitian terdapat implikasi terkait pengaruh bentuk kelembagaan otoritas pajak, tingkat konsumsi, *foreign direct investment*, *industry value added*, *openness*, dan *dependency ratio* terhadap *tax ratio* pada negara-negara berkembang yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Terkait kesimpulan penelitian bahwa bentuk kelembagaan otoritas pajak merupakan variabel yang berpengaruh meningkatkan *tax ratio* pada negara berkembang dan fakta bahwa negara-negara berkembang dengan otoritas pajak berbentuk SARA memiliki *tax ratio* yang lebih tinggi dibandingkan negara-negara berkembang dengan otoritas pajak non-SARA, maka disamping berbagai pertimbangan politik, hal tersebut seharusnya menjadi salah satu pertimbangan logis bagi para pembuat kebijakan terkait keputusan untuk membentuk badan otonomi pajak (SARA).
2. Terkait kesimpulan penelitian bahwa *foreign direct investment* berpengaruh meningkatkan *tax ratio* pada negara-negara berkembang, maka untuk meningkatkan *tax ratio*, pemerintah harus menjaga iklim investasi sehingga dapat menarik investor asing untuk melakukan investasi. Namun, hal tersebut harus diimbangi dengan berbagai kebijakan yang dapat mendorong penanaman modal dalam negeri (PMDN) agar tidak menimbulkan ketergantungan yang tinggi terhadap modal asing.

3. Terkait struktur ekonomi pada negara-negara berkembang yang telah memasuki fase *post-industrialization* yang didominasi oleh sektor jasa, maka untuk meningkatkan penerimaan *tax ratio*, pemerintah melalui otoritas perpajakan perlu mengoptimalkan kinerja pemungutan pajak pada sektor jasa sebab mayoritas sektor jasa merupakan sektor informal yang sulit untuk digali potensi perpajakannya. Terkait hal ini, pemerintah harus menciptakan berbagai payung hukum perpajakan yang dapat menyentuh sektor-sektor jasa khusus misalnya penerbitan peraturan perpajakan khusus bagi perusahaan-perusahaan digital (*over the top/ OTT*) yang melakukan penyediaan layanan dengan konten berupa data, informasi, atau multimedia yang berjalan melalui jaringan internet yang tumbuh sangat pesat akhir-akhir ini.
4. Terkait kesimpulan penelitian bahwa *openness* berpengaruh meningkatkan *tax ratio* pada negara-negara berkembang, maka untuk meningkatkan *tax ratio* disarankan agar pemerintah mendorong kegiatan perdagangan internasional, khususnya kegiatan ekspor, karena semakin tinggi kegiatan ekspor, berarti semakin besar potensi pajak penghasilan dari produsen dalam negeri yang dapat dipungut pemerintah.
5. Terkait kesimpulan penelitian bahwa *dependency ratio* berpengaruh menurunkan *tax ratio* dan sekaligus menjadi variabel yang paling dominan, maka untuk meningkatkan *tax ratio*, pemerintah Indonesia harus memanfaatkan peluang dari jumlah penduduk usia produktif yang besar. Saat ini, jumlah penduduk usia non produktif di Indonesia hanya sekitar 32,5 persen dari total penduduk (World Bank, 2015). Pemerintah diharapkan dapat memanfaatkan peluang dari bonus

demografi ini untuk memacu pertumbuhan ekonomi. Hal pertama yang perlu dilakukan pemerintah adalah meningkatkan daya saing angkatan kerjanya melalui peningkatan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia kerja saat ini. Ketika angkatan kerja terserap sepenuhnya oleh dunia kerja, maka pendapatan per kapita penduduk akan meningkat, perekonomian negara meningkat, dan pada akhirnya penerimaan pajak juga akan turut meningkat.

5.3. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diperbaiki pada penelitian-penelitian selanjutnya. Adapun keterbatasan tersebut antara lain :

1. Dalam penelitian ini, keenam variabel independen yang diteliti hanya mampu menjelaskan variasi *tax ratio* sebesar 40,6%, sedangkan 59,4% sisanya berasal dari penyebab lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti pengaruh variabel-variabel lain misalnya pengaruh sektor jasa, sektor agrikultur, pengaruh tingkat pendidikan atau indeks persepsi korupsi suatu negara terhadap *tax ratio*.
2. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini masih belum *update* hingga tahun 2015 karena masalah ketersediaan data, sehingga sampel yang digunakan kecil, yakni hanya 44 (empat puluh empat) negara dari total 152 (seratus lima puluh dua) negara berkembang, atau sebesar 28,95% dari total populasi negara berkembang.